

AKHLAK BEREKONOMI SUATU TINJAUAN TEONOMIC

Oleh: Abdul Aziz, M.Ag

Abstrak

Ekonomi adalah kegiatan yang langsung berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis ekonomi akan berdampak pada munculnya krisis di bidang politik, sosial, hukum dan budaya serta agama, bahkan kemiskinan ditengarai menjadi ancaman yang serius bagi iman dan keyakinan agama. Nabi Muhammad saw, pernah bersabda, kada al-faqru an-yakuna kufuran, hampir dipastikan kemiskinan membawa akibat kekufuran.

Keyword : *Ahlak, Ekonomi, teonomic*

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti usaha. Bagian dari kegiatan ekonomi, bisnis merupakan aspek penting dalam kehidupan yang pasti semua orang mengenalnya karena itu ada sebuah adigium, bisnis adalah bisnis. Bisnis jangan dicampurkan dengan etika.

Demikianlah beberapa ungkapan yang sering kita dengar yang menggambarkan hubungan antara bisnis dengan etika sebagai dua hal yang terpisah satu sama lain. Inilah ungkapan-ungkapan yang oleh Richard De George disebut sebagai Mitos Bisnis Moral. Sementara, Adam Smith, orang pertama yang dianggap sebagai bapak ekonomi menekankan pada aspek moral dalam kaitannya dengan ekonomi diistilahkan dengan sebutan *invisible hand*. Ini artinya, landasan moral dalam dunia ekonomi dan bisnis adalah sangat urgen, apalagi dunia bisnis ini telah mengetengahkan aspek materialisme radikal. Buah dari teori kapitalisme sekuler dan komunisme Karl Marx.

Dalam buku ini akan kita bahas suatu landasan nilai dalam melakukan tindakan ekonomi dan bisnis dengan fondasi falsafah moral (akhlak) yang Qurani. Prinsip pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa dalam al-Qur'an bahwa Allah Yang Maha Kuasa adalah satu-satunya yang memberi rizki kepada makhluk-makhluk-Nya dan memenuhi kebutuhan mereka, Q.S. 35: 3, Q.S. 39: 49, dan Q.S. 28: 76, dan lain sebagainya. Karena itu, landasan nilai Qur'ani sangat menjiwai seluruh kegiatan dan tindakan manusia, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnisnya.

A. Pengertian Akhlak Ekonomi

Kata *ekonomi* berasal dari bahasa Yunani (*Greek*): *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.¹

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-Iqtishad*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasinya semakin banyak dan dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara².

Mengatur urusan "rumah tangga" dalam ekonomi di sini berkaitan dengan mengatur tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sejenisnya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi serta lainnya. Jadi, prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Jadi, akhlak ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumberdaya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rajawali Press, Jakarta, 1997 hal. 2

² An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hal. 47

sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari di dominasi kegiatan ekonomi. Sebutan secara rasional pada dirinya mengandung arti nilai. Mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional menunjukkan adanya keharusan memilih sejumlah alternatif cara penggunaan sumber-sumber daya; akan tetapi secara ekonomi cara yang lebih rasional yang seharusnya dipilih. Rasionalitas di sini telah menyiratkan nilai ekonomi berdasarkan aspek *normative-transcendental*. Jadi secara etis, al-Qur'an mengatur perilaku ekonomi dalam bidang konsumsi, produksi dan distribusi, serta kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Karena itu, akhlak ekonomi dapat dikatakan dalam istilah lain sebagai etika bisnis.

Istilah etika bisnis itu sendiri adalah bagian dari (aktivitas) yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan di antara *manusia* yang satu dengan *manusia* lainnya. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia.

Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan manusia, bisnis dapat dan memang pada tempatnya untuk dinilai dari sudut pandang moral, dari sudut pandang baik buruknya tindakan manusia bisnis sejauh sebagai manusia, persis sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral.

B. Fondasi Moral Ekonomi

Konsep yang general dan umum yang ada pada kita tentang istilah *nilai*, sebenarnya adalah konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan orang untuk mendapatkannya memunculkan konsep nilai. Tetapi, makna "nilai" dan "sistem nilai". Istilah nilai dalam pengertian luas ini diterapkan pada obyek-obyek maupun pada manusia dan perilakunya.

Nilai-nilai tentang yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk di bidang kehidupan ekonomi didasarkan kepada konsep pemuliaan terhadap anak Adam. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling indah, (Q.S. At-Tin, 3). Tapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk bukanlah hanya dari segi fisik saja. Kehidupan manusia mengandung dua dimensi,

jasmani dan rohani. Karena aspek rohani ini bersifat unik pada manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya maka inti eksistensi manusia ini terletak pada aspek rohaninya itu. Dengan rohani itu manusia memperoleh makna dalam hidupnya.

Kenyataan sosial dan sejarah menunjukkan, bahwa manusia justru telah gagal menghargai makna hidup yang dimilikinya itu. Terdapat bukti, bahwa manusia justru meletakkan dirinya di bawah subordinasi makhluk rendah yang dibuatnya sendiri. Ini diperlihatkan pada sistem perekonomian Raja Namrud dan Fir'aun, yang umumnya disusun atas dasar komando. Ini sebenarnya hanya terjadi di sekitar pusat kekuasaan. Di daerah-daerah yang jauh dari konsentrasi kekuasaan, kehidupan ekonomi diatur atas dasar dan semangat kolektif. Semua bekerja untuk semua dalam suatu sistem yang tertutup.

Di kota-kota, sudah ada pembagian kerja yang lebih luas, karena orang menyadari bahwa setiap orang tidak memiliki semua keterampilan maupun waktu untuk membuat semua barang kebutuhannya. Tapi perkembangan kebutuhan yang meningkat, terutama sebagai hasil angan-angan, baik yang berwujud barang kebutuhan praktis maupun barang-barang budaya dan kesenian, terutama dalam wujud bangunan yang megah yang juga merupakan simbol-simbol dan alat-alat penghimpunan pengaruh dan kekuasaan, menimbulkan gagasan untuk menghimpun manusia dalam jumlah banyak untuk mewujudkan barang-barang itu. Maka timbullah cara perbudakan yang didukung oleh sistem kekerasan. Agama, dan sistem ini adalah alat pendukung kekuasaan, guna menciptakan sistem ketaatan dan legitimasi yang membenarkan kekuasaan tirani.

Sistem perbudakan, walaupun dalam skala lebih kecil, terdapat juga di Makkah pada saat ayat-ayat al-Qur'an diturunkan. Seperti telah terjadi di berbagai tempat yang merupakan pusat-pusat peradaban dunia pada waktu itu, sistem perbudakan itu bisa makin meluas. Karena itu, pagi-pagi, al-Qur'an telah melakukan kriti terhadap sistem itu. Salah satu tugas utama agama, adalah memberantas perbudakan (*fakku raqabah* atau *tahriru raqabah*) yang dilukiskan oleh Surat *Al-Balad* sebagai sebuah pendakian bukit yang terjal (*al-aqabah*). Ayat-ayat al-Qur'an menjalankan misi ini, tidak dengan menghasut suatu pemberontakan, melainkan mula-mula dengan menyadarkan masyarakat tentang status manusia yang merdeka.

Dalam berbagai ayat al-Qur'an, kemerdekaan diekspresikan dalam berbagai kata, baik kata benda (seperti *hurr*, *bara'* atau *bari'*) maupun kata kerja (seperti *fakka*, *harrara*, *khala*, *maraja*, *sarraha* atau *talaqai*). Tapi ada tiga jenis kemerdekaan yang secara konsisten diulang-ulang dalam al-Qur'an, yaitu kemerdekaan dari rasa takut (yang berarti hak atas keamanan, keselamatan dan ketentraman), kemerdekaan dari kelaparan (yang berarti hak atas penghidupan dan kemakmuran) dan kemerdekaan dari perbudakan (yang berarti hak untuk berbuat dan menentukan pekerjaannya atau nasibnya sendiri). Etika Islam didasarkan antara lain atas prinsip kemerdekaan ini, yaitu merupakan dasar dari hak asasi manusia.

Hak kemerdekaan seseorang itu ditumbuhkan dari dalam melalui rasa merdekanya, dengan mempergunakan akal dan menyadari rezeki Allah yang tidak terbatas. Sistem perbudakan manusia feodal, sebenarnya mengantongi pesimisme diri dan kekuranganberdayaan menghadapi lingkungan alam yang memang tidak begitu ramah terhadap manusia. Ini berakibat timbulnya gagasan orang untuk menghimpun dengan paksa energi sosial, untuk kepentingan diri dan kelompok atau kelasnya.

Berhadapan dengan kenyataan ini, al-Qur'an menghidupkan optimisme dengan menyatakan bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas dan manusia memiliki segala kemampuan untuk mengelolanya. "*Dan Dialah yang menjadikan bumi bagaikan hamparan dan langit bagaikan atap. Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki*", (Q.S. Al-Baqarah, 2: 22).

Dalam Surat an-Nahl: 13, al-Qur'an menyatakan kembali fungsi ke-*Khalifahan* manusia untuk meyakinkan kemampuan manusia: "*Dia pula yang menundukan (kepada manusia) apa yang Ia ciptakan di bumi, dengan cara yang berlain-lainan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran*".

Optimisme, menurut al-Qur'an baru akan timbul apabila manusia mampu mengambil pelajaran secara sistematis. Manusia akan mengerti berbagai fungsi yang terdapat di alam, karena mereka memiliki pengetahuan bahwa segala alam ciptaan ini mengandung tujuan penciptaan yang benar atau pasti, dengan ukuran-ukuran waktu yang ditentukan.

Dengan kesadaran bahwa segala ciptaan Allah yang dijumpai manusia itu adalah barang-barang yang berguna bagi manusia, akan timbul

pengertian akan adanya *potensi*. Dalam surat Nahl: 18, ditegaskan: “*Jika dihitung-hitung ni’mat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlahnya (karena tidak terbatasnya)*”. Itulah yang memberikan optimisme, dan karena itu manusia tidak perlu khawatir sehingga terpaksa mengambil apa adanya tanpa memilih atau melakukan cara yang tidak terpuji untuk mendapatkan rezeki Allah.

Dengan pengertian yang dapat ditarik dari ayat-ayat tersebut di atas barangkali pemikiran yang kritis akan mendapatkan kesan bahwa moral yang diberikan oleh Al-Qur’an bertentangan dengan dasar-dasar atau asumsi ilmu ekonomi, setidaknya-tidaknya asumsi aliran Neo-Klasik yang dipelopori oleh Lord Robbin.

Ilmu ekonomi, menurut asumsi ini, timbul karena kesadaran dan pengertian tentang terdapatnya kelangkaan sumber-sumber dan alat-alat pemuas kebutuhan, berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam jumlah, variasi maupun mutu. Dari asumsi inilah timbul ilmu ekonomi yang memikirkan bagaimana masyarakat harus membangun suatu sistem produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan hidup mereka yang terus meningkat, baik karena perkembangan penduduk, tuntutan kepada taraf hidup yang lebih tinggi dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam mempertahankan dan melangsungkan kehidupan.

Berhadapan dengan pengertian tentang asumsi ekonomi itu yang secara umum diterima sebagai paradigma itu, moral yang ditimbulkan oleh Al-Qur’an justru sebaliknya, yaitu menciptakan pengertian tidak adanya kelangkaan sumber pemuas hidup, karena rizeki Allah senantiasa melimpah, tidak saja cukup bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Bahkan dalam surat Hud: 6 dikatakan pula: “*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya*”. Tapi dalam kenyataannya, banyak manusia di bumi ini yang masih dilanda kelaparan. Di satu pihak dinyatakan bahwa situasi kelangkaan telah berakhir, kata John Kenneth Galbraith, namun kekurangan alat pemuas kebutuhan terjadi dimana-mana. Sebab itu memang dibutuhkan kalkulus, baik terhadap kebutuhan manusia maupun hasil produksi alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Al-Qur’an menghendaki agar manusia “bersyukur”. Tapi, seperti dinyatakan oleh ayat 8 surat al-A’raf, sedikit manusia yang bersyukur.

“Syukur” dalam pengertian ekonomi mengandung makna, pertama, menyadari bahwa sumber rizeki itu adalah dari Allah dan dengan begitu

menyadari hak dan akses setiap manusia terhadap sumber rizeki itu yang dapat dicapai melalui kerja. *Kedua*, menyadari bahwa rizeki Allah itu tidak terbatas dalam variasi, jumlah maupun mutunya. Dari kesadaran ini timbul optimisme positif bahwa manusia itu harus bisa memilih di antara rezeki Allah yang paling baik dan halal untuk mencapainya manusia tidak perlu melakukan berbagai hal yang tidak wajar, misalnya dengan cara yang merusak atau merugikan orang lain.

Ketiga, menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah dan sekaligus menyadari bahwa rezeki itu sebenarnya tidak hanya untuk sekelompok kecil orang sehingga orang mampu bertindak untuk membelanjakan hartanya secara bermanfaat bagi orang lain juga. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah menghargai sumber-sumber ekonomi, yang diwujudkan dalam tindakan rasional, dengan menerapkan prinsip kalkulus ekonomi, mengingat bahwa semua sumber rizeki itu diberikan oleh Allah dalam takaran-takaran tertentu.

C. Prinsip-Prinsip Akhlak Ekonomi

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Bisnis Jepang akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut dan seterusnya. Demikian pula, prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita.

Namun, sebagai etika khusus atau akhlak berbisnis, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, di sini secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis tersebut.

Pertama, prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.

Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Hanya orang yang bebas yang bisa bertindak secara etis karena

tindakan etis adalah tindakan yang dalam bahasa Kant, bersumber dari kemauan baik serta kesadaran pribadi. Hanya karena seseorang mempunyai kebebasan, ia bisa dituntut untuk bertindak secara etis. Manusia, bila meletakkan kehendaknya di bawah kendali intuisi dan merasakan kewajiban, secara langsung akan merasakan kebebasan bila di depannya terdapat pilihan antara dua tindakan.

Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis. Seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau dia diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Tanpa kebebasan ini pelaku bisnis hanya akan menjadi robot yang bisa tunduk pada tuntutan, perintah, dan kendali dari luar dirinya.

Namun, kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Karena dengan kebebasannya seseorang dapat bertindak secara membabi buta tanpa menyadari apakah tindakannya itu baik atau tidak. Dengan kebebasannya seseorang dapat bertindak sesuka hatinya, dan karena itu malah bertindak secara tidak etis. Karena itu, otonomi juga harus adanya tanggung jawab. Inilah bahasan teknis yang harus diajukan pada falsafah etika dan falsafah hukum.

Prinsip kedua, kejujuran. Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraup untung. Harus diakui bahwa memang prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tipu menipu (*ihthikar*) atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau karena dasarnya memang ia sendiri suka tipu menipu.

Prinsip ketiga, keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan. Demikian pula, prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnisnya entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*) atau dalam bahasa agamanya adalah *an-taradin* (saling percaya

dan mempercayai). Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Prinsip kelima, integritas moral. Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dalam bahasan Kant, bahwa suatu tindakan yang baik adalah yang dilaksanakan demi memenuhi kewajiban. Ia memahami sepenuhnya bahwa suatu nilai umum bagi semua tindakan dan perilaku adalah pemenuhan kewajiban.

Karena itu, harus ada komitmen dalam dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah meruakan suatu tindak kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam etika Islam, komitmen itu adalah taqwa yang diajukan dalam sistem moral, sebagaimana telah disinggung dimuka - plus spesifikasi yang timbul dari sikap dan kultur yang Islami.

Komitmen itu harus dilandasi pada nilai-nilai agama sebagai prinsip partisipatoris aktif dalam mengamalkan ajaran agamanya. Seperti harus memahami bahwa "*Pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah?*" Rasulullah menjawab

D. Akhlak Berekonomi

Berkaitan dengan akhlak ekonomi atau tatanan ekonomi yang bermoral, dua hal penting yang menjadi landasannya adalah *efisiensi* dan *keadilan*. Persoalan *efisiensi* atau inefisiensi mencakup tiga hal, yaitu: a) persoalan alokasi sumber daya, b) perilaku manusia, dan c) sistem kemasyarakatan³. Sementara itu persoalan keadilan ekonomi begitu diperlukan karena di dalamnya terdapat hal-hal berkaitan dengan aturan main dalam relasi ekonomi. Keadilan ekonomi ini akan menjadi suatu etika tersendiri, yang setidak-tidaknya besumber dari hukum-hukum alam, hukum Tuhan dan sifat-sifat sosial manusia.

Ekonomi adalah kegiatan yang langsung berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, yang berkaitan dengan

³ Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*.1988, hal. 13

kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis ekonomi akan berdampak pada munculnya krisis di bidang politik, sosial, hukum dan budaya serta agama, bahkan kemiskinan ditengarai menjadi ancaman yang serius bagi iman dan keyakinan agama. Nabi Muhammad saw, pernah bersabda, *kada al-faqru an-yakuna kufuran*, hampir dipastikan kemiskinan membawa akibat kekufuran.

Oleh karena kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok dalam kehidupan masyarakat, akan menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial, apalagi yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan makin sulit hidupnya. Ada seorang penjahat yang ditanyakan kepadanya, apakah tidak takut mati, baik terbakar atau ditembak polisi, ia menjawab apa yang mesti ditakuti dengan mati, dan apa bedanya mati sekarang dengan esok, karena keadaan esok baginya tidak akan lebih baik dari sekarang, bahkan mungkin akan menjadi makin buruk, mengingat usianya yang makin tua, sementara pengangguran makin besar dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

Padahal dalam setiap kegiatan ekonomi, penghasilan dan kekayaan yang diperoleh perusahaan atau seorang pengusaha pada hakikatnya tidak bisa dicapai dengan bekerja sendirian, karena di dalamnya selalu melibatkan tenaga dan pikiran banyak orang, bahkan, jerih payah dan cucuran keringat dari para karyawan dan para pembantunya. Sementara mereka menyaksikan betapa jauhnya kesenjangan pendapatan, serta fasilitas yang diterima antara yang di atas dengan bawahan. Nabi Muhammad saw., mengingatkan bayarlah upah karyawan sebelum kering keringatnya.

Secara etis filosofis, pemilikan kekayaan dan harta benda oleh individu atau pun masyarakat, tidaklah bersifat mutlak, karena kekayaan sesungguhnya diperoleh hanya dengan memanfaatkan kekayaan alam dan kerjasama dengan sesama manusia yang lainnya, dan pemilik mutlak yang menguasai langit dan bumi adalah hanya Allah sendiri, bukan manusia, baik oleh pribadi maupun masyarakat. Al-Qur'an 31: 25-26 mengatakan: *“Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka: siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka berkata Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Oleh karena alam, rezeki dari langit dan bumi diberikan Allah kepada manusia sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, maka pemilikan kekayaan oleh seseorang tidak bersifat mutlak, dan dalam setiap kekayaannya terdapat hak orang lain, yang harus diberikan baik melalui zakat atau infaq dan shadaqah yang lainnya. Al-Qur'an 51: 19 mengatakan: *“Dan pada harta kekayaan mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta”*.

Jika hak orang lain ada dalam kekayaan dan harta benda seseorang tidak dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak yaitu fakir miskin dan yang membutuhkan lainnya, maka kekayaan itu tidak ada manfaatnya bagi lingkungan di sekitarnya dan seringkali akan menjadi sumber fitnah, dan kecemburuan sosial yang makin lama akan menjadi kebencian dan ketidaksenangan pada pemilikinya, dan karena seseorang itu hidup bersama dan membutuhkan orang lain, maka keadaan yang demikian pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Al-Qur'an 64: 15 menyatakan: *“Sesungguhnya harga kekayaanmu dan anak-anakmu dapat menjadi fitnah. Dan di sisi Allah pahala yang besar”*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Asy'ari, Musa, 2001. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*, LEFSI, Yogyakarta.

- _____, 1999. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*. LEPSI, Yogyakarta.
- Ilyas, Yunahar, 1999. *Kuliah Akhlak*, LPPI UMY, Yogyakarta.
- Muthahhari, Murtadha, 2004. Terjemahan dari *Falsafatul Akhlaq* dengan, *Filsafat Moral Islam: Kritik Atas Berbagai Pandangan Moral*, Al-Huda, Jakarta.
- Rahardjo, Dawam M., 1996. *Ensiklopedi al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta.
- _____, 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish, 1997. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, Bandung.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Taqi Misbah, Muhammad, 1996. *At-Tawhid or Monotheisme: as in the ideological and the value systems of Islam*. Di terjemahkan dengan judul: *Monoteisme: Tauhid Sebagai Sistem Nilai dan Akidah Islam*. Lentera Basritama, Jakarta.